PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Pemanfaatan Modal Dedi Sitorus Sebagai Pendatang Baru Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara

Dedi Sitorus's use of Capital as a New Comer The 2019 Electoral Election North Kalimantan

Ansar, Muradi & Ferry Kurnia Rizkiansyah*

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: 19 Mei 2021; Direview: 19 Mei 2021; Disetujui: 14 Oktober 2021

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan modal seorang caleg pendatang baru yang menang dalam sebuah daerah pemilihan yang baru saja dimekarkan, masalah di fokuskan pada bagaimana aspek modal sosial, modal politik dan modal ekonomi dari seorang aktor pendatang baru. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Bordieu (1992) dan Maridjan (2006) data-data yang dikumpulkan melalui data lapangan dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kemenangan Dedi Sitorus karena memiliki lebih dari satu modal. ada beberapa pertimbangan mendasar yang penting seperti : pertama modal sosial Dedi Sitorus memiliki Jaringan Sosial di masyarakat Nunukan, Kedua Modal Politik Dedi Sitorus memiliki dukungan dari partai mulai dari tingkat pusat dan Juga Pengurus DPC tingkat Kabupaten Nunukan dan juga adanya dukungan dari Penguasa Daerah dan juga Tokoh Politik lokal, Ketiga Modal Ekonomi Dedi Sitorus memiliki finansial yang sangat besar sehingga tidak memerlukan donatur dalam melakukan kampanye dan memiliki kemampuan sewa transportasi udara untuk melakukan mobilitas dalam kampanye. Dengan adanya akumulasi seluruh modal yang dimiliki maka Dedi Sitorus dapat memanfaatkan dan menggunakan momentum dengan baik sehingga mendapatkan perolehan suara yang signifikan dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

Kata Kunci : Pemanfaatan Modal; Pemenangan; Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstract

This paper aims to determine the capital utilization of a newcomer candidate who wins in an electoral district that has just been expanded, the problem is focused on how aspects of social capital, political capital and economic capital of a newcomer actor. In order to approach this problem, the theoretical reference from Bordieu (1992) and Maridjan (2006) data collected through field data and documentation is used and analyzed qualitatively. This study concludes that Dedi Sitorus's victory was due to having more than one capital. There are several important fundamental considerations such as: first, Dedi Sitorus' social capital has a Social Network in the Nunukan community, Second, Dedi Sitorus' political capital has support from parties starting from the central level and also the DPC administrator at the Nunukan Regency level and also the support from regional authorities and also figures Local Politics, Third Economic Capital Dedi Sitorus has very large finances so he does not need donors to carry out his campaign and has the ability to rent air transportation to carry out mobility in campaigns. With the accumulation of all the capital owned, Dedi Sitorus can take advantage and use the moment well so that he gets a significant vote in the 2019 legislative elections.

Keywords: Use of Capital; Winning; Election of the House of Representatives of the Republic of Indonesia

How to Cite: Ansar. Muradi. & Rizkiansyah, F.K. (2022). Pemanfaatan Modal Dedi Sitorus sebagai Pendatang Baru PILEG Tahun 2019 DAPIL Kaltara. *PERSPEKTIF*, 11(1): 16-24

*Corresponding author:

E-mail: Arfisipol@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan bentuk manifestasi dari kebebasan rakyat untuk memilih partai dan tokoh yang berhak mewakili rakyat diparlemen, di Indonesia Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam pemilihan 2019 juga dibarengi dengan Pemilihan Presiden dan wakil presiden.

Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, berbeda dengan Pemilu-Pemilu Sebelumnya Pemilu ini menggabungkan Pemilihan Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Sahbani, 2014). Sedangkan untuk peserta yang akan mengikuti kontestasi politik Komisi Pemilihan Umum Telah menetapkan partai politik sebanyak 20 peserta partai politik yang akan berkompetisi diantaranya 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. dari jumlah partai tersebut terdapat 4 partai baru yang lolos verifikasi hasil pemilu diantaranya Partai Perindo, Partai Garuda, Partai solidaritas Indonesia dan Partai Berkarya. (Infopemilu.kpu.go.id, 2019).

Dalam sistem Pemilu 2019 sistem yang digunakan masih seperti pemilu sebelumnya, yaitu sistem proporsional terbuka dimana figur personal seorang caleg sangat menentukan dibandingkan dengan dari pilihan partai politik, sehingga dampak sistem ini menjadi *cost* pemilu berbiaya mahal (Wibowo, 2013). Mahalnya demokrasi yang terjadi sebagai akibat persaingan yang semakin keras sesama calon legislatif terutama dari partai politik yang sama atau istilah lainnya yang biasa disebut *canibal system*, sistem ini membuat peran partai politik menjadi lemah. Namun yang perlu diperhatikan akibat melemahnya partai politik menurut Norris dan Lovenduski, 2007 (dalam Dewi, 2018) terdapat dua pola rekrutmen calon dalam partai politik : pertama, pola vertikal dimana rekrutmen parpol dilakukan secara hirarki melalui jalur struktural organisasi partai dimana biasanya partai akan memilih kadernya yang telah memiliki rekam jejak bekerja untuk partai selain

pertimbangan kemampuan politik seseorang; pola ini sering disebut sebagai *merit system*.

Kedua, pola lateral dimana rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial dipartai tingkat lokal yang terendah hingga ke paling tinggi; menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis; kader-kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang kader senior atau petahana (Dewi, 2018). Melihat sebagian aspek diatas, sehingga bagaimana demokrasi prosedural bekerja dalam memilih orang yang menempatkan figur sebagai pertimbangan utama dalam memastikan calon legislatif untuk dipilih oleh pemilih. Dengan kata lain kalau modalitas juga ialah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan kontestasi politik, sebab saling koheren antara satu dengan yang lain.

Sebagaimana dengan daerah lain yang ada di Indonesia Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan pemilihan legislatif baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota di Kalimantan Utara. Pemilihan ini adalah yang pertama kali sejak provinsi ini menjadi daerah pemekaran. Pemekaran menurut sudut pandang Bourdieu bentuk pemekaran adalah adanya penguasaan dan pengelolaan di daerah tertentu, kalau Bourdieu menyebutkan modal politik diantaranya adalah modal materi, modal simbolik, modal sosial maka proses pemekaran adalah bentuk penguasaan “ambisi” dalam berbagai modal tersebut (Halim, 2018).

Kondisi geografis provinsi hasil pemekaran ini terletak di perbatasan bagian utara pulau Kalimantan, provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu negara bagian Sabah Malaysia. Saat ini provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang termuda resmi disahkan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 25 oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, dengan hasil pemerkan wilayah daerah masih memiliki pembangunan dan sarana publik sangat minim, baik sarana pendidikan, kesehatan maupun transportasi.

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari beberapa daerah yaitu 4 Kabupaten 1 Kota diantaranya Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung dan Kota Tarakan, adapun jumlah pemilih di Kalimantan Utara yaitu 490.874

pemilih. Sedangkan jumlah caleg yang akan berkompetisi pada Pemilu 2019 berjumlah 43 orang, untuk jumlah kursi yang diperebutkan pada Dapil Kalimantan Utara yang akan duduk di DPR RI berjumlah 3 Kursi.

Dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 pada Dapil Kalimantan Utara yang diadakan di 5 Kabupaten/Kota caleg yang terpilih 3 (tiga) orang dengan perolehan suara masing-masing Dedy Sitorus dari PDIP yang mencapai 34.709 suara calon sedangkan suara partai mencapai 73,880 suara, Arkanata Akram dari Partai Nasdem mencapai 30.315 suara calon sedangkan suara partai mencapai 62,971 suara, serta Hasan Saleh dari partai Nasdem mencapai 18.905 suara calon sedangkan suara partai 37,616 suara.

Dari ketiga caleg yang terpilih diantara perolehan suara yang tertinggi yaitu Dedi Sitorus dari PDIP baik dari perolehan suara calon dan perolehan suara partai yaitu 34.709 suara calon sedangkan suara partai mencapai 73,880 suara, sedangkan perolehan suara diantara 5 Kabupaten/kota yang tertinggi ada di Kabupaten Nunukan dengan jumlah suara sebanyak 14.479 suara. Berdasarkan hal tersebut maka Dedi Sitorus menduduki urutan pertama dari total suara sah sebesar 34,709, adapun perolehan suara terbesar ada di Kabupaten Nunukan (KPU Kaltara, 2019).

Berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh aktor Dedi Sitorus pada pemilihan legislatif 2019 Dapil Kalimantan Utara menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat begitu tinggi untuk memperjuangkan aspirasi warga Kaltara sebagai anggota DPR RI di Parlemen. Sedangkan aktor ini bukan merupakan dari masyarakat Kalimantan Utara melainkan dari luar Wilayah Kalimantan Utara yang dicalonkan oleh PDIP. Tetapi pencalonan ini pasti sudah dipikirkan dengan matang dimana aktor Dedy Sitorus telah mempunyai latar belakang yang cukup untuk ditempatkan pada Dapil ini. Aktor ini bersentuhan pertama kali di Tarakan Kalimantan Utara pada tahun 2010 untuk membantu sahabatnya yang mempunyai perusahaan tambak udang, melalui sahabatnya ini dia mengenal dengan baik wilayah ini.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2015 Dedi Sitorus ditugaskan secara khusus oleh DPP PDI perjuangan untuk memimpin Tim

Pemenangan Pilkada serentak di Provinsi Kaltara tahun 2015. Dibawah kepemimpinan dedy sitorus dan upaya seluruh kader partai serta pasangan calon PDI Perjuangan berhasil memenangkan seluruh Pilkada pada waktu itu (Benuanta.co.id, 2019). Sehingga aktor dedy sitorus selaku kader partai telah membentuk Tim/jejaring di 5 kabupaten/kota untuk memenangkan pasangan IRAU (Irianto Lambri dan Udin Hianggio) Gubernur yang saat sekarang ini menjabat.

Fenomena berikutnya adalah aktor dedy sitorus memiliki kemampuan yang baik dalam membangun hubungan jejaring sosial, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari pemuda-pemuda perbatasan yang sebagai tim relawan Dedi di beberapa kecamatan berlangsung cukup masif dan siap memenangkan menuju kursi DPR RI, dukungan juga mengalir dari tokoh adat bugis dan ketua kerukunan NTT yang juga siap memenangkan aktor tersebut. Aktor ini juga kerap menemui kelompok kelompok keagamaan untuk melakukan sosialisasi kemenangan dirinya sehingga muncul dukungan dari kelompok tersebut, menurut asumsi peneliti bahwa hubungan kelompok dan individu adalah bentuk modal sosial dari seorang aktor dedy sitorus yang berbentuk ikatan timbal balik.

Ada pula yang dimaksud modal sosial di sini, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Bourdieu dan Wacquant, (1992) bahwa Modal sosial merupakan sumber daya, aktual ataupun maya yang berkumpul pada seseorang individu ataupun kelompok sebab mempunyai jaringan tahan lama berbentuk ikatan timbal balik pengenalan serta pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (dalam Field, 2010).

Selain modal sosial, yang tidak kalah penting lagi, yakni modal politik yang sudah barang tentu dibutuhkan oleh seorang aktor politik, termasuk Dedy Sitorus dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif 2019. Adapun modal politik yang dimaksud di sini, yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh Kacung Marijan, (2007) bahwa modal politik menunjukkan bahwa fungsi partai politik tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi kandidat yang mengikuti kontestasi politik. Dengan kata lain, modal politik menunjukkan adanya

dukungan dari sebuah kekuatan politik, salah satunya yakni partai politik itu sendiri.

Selanjutnya dalam hal fenomena politik yang terjadi adalah aktor Dedi Sitorus adalah seorang kader PDIP yang telah lama berkiprah dipartai ini, pengalaman tidak lolosnya menjadi anggota DPR RI pada dapil II riau membuat aktor ini melakukan pendekatan dengan tokoh politik lokal sehingga memberi dukungan dan yang lain adalah adanya komunikasi politik dengan para konstituen sehingga memilih aktor tersebut, dukungan yang lain juga muncul dari pimpinan penguasa daerah Kabupaten Nunukan berupa membantu menyukseskan aktor dalam pemilihan, dukungan itu tidaklah muncul secara tiba-tiba karena pada saat pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati Nunukan tahun 2015 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk mendukung seluruh kepala daerah di Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan.

Jenis modal yang ketiga adalah modal ekonomi, menurut Bourdieu (dalam Halim, 2018) yakni sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya, modal ekonomi mencakup alat-alat produksi (Mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang. Semua jenis modal ini mudah dipergunakan untuk segala tujuan termasuk di dalamnya mendapatkan kekuasaan dalam arena pemilihan umum.

Adapun fenomena modal ekonomi dari aktor Dedi Sitorus adalah aktor tersebut dalam hal tahapan kampanye metode yang digunakan adalah mendatangi langsung para pemilih di setiap kecamatan, dengan kondisi medan yang sulit di akses di kecamatan-kecamatan pedalaman maka Dedi Sitorus menggunakan transportasi udara (*chopper*) bersama tim pemenang untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan para konstituennya, sehingga aktor tersebut sangat populer di kalangan masyarakat. Begitu juga dalam hal pelaporan dana kampanye menurut laporan bendahara partai demokrasi perjuangan bahwa caleg yang memiliki hasil laporan penerimaan dana kampanye (LADK) yang terbesar adalah caleg Dedi Sitorus berjumlah 4 milyar lebih, disusul oleh caleg Rano Karno berjumlah 4 milyar (Medistiara, 2019), adapun pembiayaan dana kampanye ini diperuntukkan untuk membiayai

kampanye calon, pengadaan pencetakan baliho, spanduk dll.

Dalam hal kontestasi politik tentu para aktor memiliki modal yang beragam untuk meraih kemenangan. Modal merupakan sumber daya politik yang dapat digunakan untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif merupakan arena kontestasi politik antara pihak yang memperebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi-kursi di senayan. Kompetisi ini bersifat terbuka antara caleg baik internal maupun eksternal sehingga figur dari kandidat sangat menonjol seperti ketokohan, popularitas dan moral, latar belakang dan pekerjaan dalam memperebutkan dukungan suara dari masyarakat.

Teori Modal dicetuskan oleh sosiolog Pierre Bourdieu, dalam buku Politik lokal aktor, problem dan Konflik Arus Demokratisasi (Halim, 2018) mengungkapkan teori modal ini berkaitan erat dengan kekuasaan karena pemetaan hubungan kekuasaan didasarkan atas kepemilikan modal dan komposisi modal tersebut, modal habitus dan ranah adalah konsep kekuasaan yang tidak bisa terpisahkan. Ketika ranah merupakan arena perjuangan dan kekuatan dari sebuah posisi dan otoritas yang legitimit sehingga didalamnya terdapat modal yang beroperasi. Relasi kekuasaan yang diaktifasi dengan modal akan menghasilkan kategori-kategori modal, seperti modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik.

Menurut Bourdieu (dalam Sjaf, 2014) modal akan eksis dan berfungsi dalam arena serta memiliki kekuatan terhadap arena sehingga menentukan keuntungan-keuntungan yang diperoleh para aktor didalam arena. Kemudian modal tersebut dimanfaatkan aktor untuk memperkuat (mempertahankan atau merebut) kedudukan aktor di arena. Oleh karena itu pertarungan dalam arena harus memiliki modal dan kemampuan strategi dalam menggunakan modal tersebut sehingga aktor memperoleh dan dapat mempertahankan proses yang diinginkan dalam arena itu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan prosedur purposif. Melalui metode kualitatif ini akan dipahami masalah-

masalah manusia dalam konteks sosial dan mencari jawaban. tujuannya untuk menganalisis bagaimana kandidat menggunakan modal sosial, modal politik dan modal ekonomi sebagai kemenangan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 pada Dapil Kalimantan Utara. dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu dan Kacung Maridjan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dimana jenis penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dengan sumber data primer adalah wawancara mendalam dan sumber data skunder dari dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Sosial Dedi Sitorus

Menurut Bourdieu (Sjaf, 2014) menegaskan modal sosial sangat bergantung pada luasnya jaringan koneksi yang bisa di mobilisasi dengan efisien serta jumlah modal yang dimiliki oleh sesuatu masyarakat. Dengan pengalaman menjadi ketua tim kemenangan pada tahun 2015 di Kalimantan Utara, maka modal sosial yang dimiliki oleh dede sitorus dalam pemilihan legislatif tahun 2019 ini adalah dengan melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku yang dianggap berpengaruh, dan juga organisasi-organisasi masyarakat adat sehingga terjalin silaturahmi antara para tokoh-tokoh tersebut. Dede sitorus juga ketika melakukan kunjungan-kunjungan ke pelosok-pelosok pedalaman sering membantu warga apabila ada kesusahan, misalnya tidak adanya air, tidak adanya lampu maka dengan hadirnya dede sitorus ke wilayah itu maka dede juga melakukan sumbangan untuk melakukan pencaharian mata air dan juga memberikan genset walaupun hanya bisa menikmati pada malam hari.

Interaksi sosial yang lain ketika dede sitorus ada warga yang tertimpa musibah seperti kematian, bencana banjir dan juga ada warga yang sakit maka dede sitorus selalu hadir untuk membantu warga sehingga bukan

saja kebutuhan warga masyarakat yang dipenuhi tetapi beliau juga menyentuh hati dan perasaan masyarakat hal itu membuat warga terbantu.

Hal yang lain juga yang dilakukan aktor adalah dengan memiliki pengalaman sebagai seorang aktifis Walhi dede sitorus dapat memfasilitasi sengketa lahan yang terjadi antara lembaga adat dengan pihak perusahaan pada wilayah pedalaman seperti sebuku, sembakung dan lumbis, tak jarang ketika masalah status lahan itu antara ketua lembaga adat, dan masyarakat adat tidak ada solusi maka dengan adanya jaringan di tingkat pusat masalah itu di bawah ke kementerian terkait untuk di pecahkan. Sehingga dengan adanya solusi terhadap lembaga adat dan masyarakat maka jaringan sosial juga terbentuk yang membuahakan suara pada pemilihan umum tahun 2019.

Dede sitorus juga merupakan penganut jemaat kristen khatolik yang taat sehingga dede juga melakukan pendekatan-pendekatan pada pendeta pastor/kanis. Berdasarkan data penduduk jumlah agama yang tersebut di kabupaten nunukan ada 6 (enam) agama yang terdaftar pada instansi yang berwenang sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Jumlah Penduduk Kab. Nunukan
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	134,325
2.	Kristen	32,251
3.	Khatolik	15,115
4.	Budha	181
5.	Hindu	77
6.	Konghucu	77
Jumlah		182,028

Sumber KesbangPol Nunukan, 2021

Dari tabel menunjukkan bahwa jumlah agama khatolik terbesar ketiga di Kabupaten Nunukan, sehingga dede merasa perlu membentuk sebuah jaringan untuk para jemaat khatolik. Bahkan tak jarang dede juga memberikan bantuan-bantuan kepada para pendeta, pastor/kanis ketika dia mendatangi sebuah kampung misalnya bantuan perbaikan jalan menuju gereja, bantuan sembako untuk para jemaat-jemaat.

Dengan seringnya dede sitorus tampil di televisi-televisi nasional mewakili tim pemenangan capres petahana dalam debat presiden dan wakil presiden maka dede sitorus memiliki popularitas yang cukup tinggi di masyarakat kaltara tetapi popularitas tidak cukup untuk mendapatkan *trust* masyarakat nunukan harus ada aksi yang nyata bagi masyarakat nunukan, bangunan kepercayaan dalam upaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan apa yang dibutuhkan warga setempat ketika bertemu dengan warga dalam satu komunitas/kelompok sikap dan tindakan yang beliau tunjukkan kepada masyarakat ingin mencari tahu apa yang di hadapi masyarakat setempat, sehingga apabila masalah itu bisa dipenuhi saat itu maka akan diselesaikan, apabila tidak maka nanti beliau akan kembali.

Dengan adanya modal koneksi sosial yang bersifat tahan lama dari seorang caleg dede sitorus dapat membentuk *network* yang dapat memobilisasi suara ke Tempat pemungutan suara.

Modal Politik Dede Sitorus

Modal politik menurut Marijan, (2006) adalah adanya dukungan dari partai politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat, adapun modal politik yang miliki dede sitorus adalah adanya dukungan dari partai DPP PDI Perjuangan tingkat pusat yang menempatkan dede pada Dapil Kaltara dengan nomor urut 1 (satu) dan juga adanya dukungan dari pengurus cabang PDI Perjuangan yang selalu memberikan *support* dan hadir pada dalam kampanye berlangsung serta tim pemenangan yang berasal dari partai internal PAC di Kecamatan-kecamatan dan juga tim diluar partai (relawan dede).

Hubungan antara penguasa lokal dan tokoh politik lokal dede sitorus telah terbentuk sejak beliau menjadi ketua tim pemenangan tahun 2015, sehingga gayung bersambut dengan seringnya melakukan pertemuan-pertemuan yang intens maka dede juga mendapatkan dukungan dari penguasa daerah bupati nunukan dan tokoh politik kharismatik yang memberikan restu untuk melakukan kerjasama dengan para caleg lokal untuk memenangkan dede sitorus, relawan juga yang dibentuk dede sitorus adalah simpatisan dari

penguasa daerah yang merupakan partai hanura. Sehingga seluruh upaya pendekatan yang dilakukan oleh dede sitorus menyebabkan suara yang di dapat kan begitu besar diantara daerah yang lain di Provinsi Kalimantan Utara.

Modal Ekonomi Dede Sitorus

Merujuk Bourdieu (dalam Fashri, 2014) modal ekonomi adalah mencakup alat produksi (mesin, tanah, buruh) dan berupa materi baik dari pendapatan dan benda-benda, uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan. Modal ekonomi menunjuk kepada dukungan dana atau finansial berupa uang yang berasal dari para caleg, dede sitorus sendiri ataupun dari partai politik dan pihak lainnya. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka membuat setiap caleg harus menyiapkan modal ekonomi yang sangat besar dengan tujuan untuk membiayai *cost* politik yang dibutuhkan saat kampanye berlangsung misalnya Billboard, baliho, spanduk dan juga kaos hingga membayar para relawan untuk sosialisasi atau mengawasi tahapan pemilu.

Kampanye dilakukan sebagai ajakan ke masyarakat untuk mempromosikan diri hingga tak jarang juga caleg memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat berupa materi, pada umumnya modal ekonomi yang dimiliki caleg ini bersumber dari dana pribadi karena setiap partai hanya membiayai sebahagian, mayoritas caleg menggunakan modal ekonomi untuk memperkuat modal sosial. Modal ekonomi menjadi pendukung agar pemilih benar-benar mau memilih caleg tersebut. Modal ekonomi pada umumnya yang dimiliki para caleg biasanya Laporan Harta Kekayaan dan Sumbangan Dana Kampanye calon, modal ekonomi berfungsi sebagai pelumas mesin politik yang di gunakan pada saat kampanye.

Berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Kab/Kota para calon anggota DPR RI wajib menyampaikan laporan harta kekayaan, sebagai syarat pengajuan untuk di lantik. Berdasarkan sumber dari yang berwenang laporan harta kekayaan Dede Sitorus tergolong yang paling tinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain, adapun harta kekayaan calon anggota legislatif yang terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 2

**Harta Kekayaan Calon Legislatif
DPR RI Tahun 2019**

No	Nama	Harta
1.	Dedi Sitorus	Rp. 7.680.827.643
2.	Arkanata Akram	Rp. 6.948.707.801
3.	Hasan Saleh	Rp. 7.141.442.000

Sumber Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021

Jika dilihat harta yang dimiliki Dedi Sitorus yang tertinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain, melihat dari harta kekayaan sebagai landasan untuk melihat modal ekonomi (uang) calon begitu penting. Karena dalam fenomena pemilihan umum langsung, pentingnya uang tak terbantahkan lagi, faktor pembiayaan merupakan faktor kritis untuk sukses dalam melakukan kampanye.

Selain LHKPN, KPU juga mewajibkan calon legislatif untuk melaporkan dana kampanye pengaturan dana kampanye ini bertujuan untuk adanya transparansi dalam melakukan kampanye dan juga sebagai bentuk pencegahan atas pencucian uang demi menjaga integritas pemilu dari segi pendanaan.

Menurut PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye peserta pemilihan umum menyebutkan bahwa calon anggota DPR dan DPRD pemilihan umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye berupa Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon legislatif tahun 2019 di Kaltara diantara 43 caleg yang berkompetisi caleg yang mengeluarkan dana kampanye yang paling besar adalah calon Dedi Sitorus dari partai PDIP Jumlah penerimaan sebesar Rp.3.000.000.000,- dan Jumlah Pengeluaran Rp. 3.309.094.455,- (form KPU Model LPPDK7-Parpol), sedangkan sumbangan dari partai politik baik berupa uang atau jasa tidak ada (nihil), jika dilihat dari laporan dana kampanye dede sitorus unggul dari calon legislatif yang lain.

Dengan kekuatan modal finansial yang besar maka dede sitorus dalam masa tahapan kampanye dapat membiayai kegiatan-kegiatan sosialisasi dan tatap muka, membiayai pertemuan terbatas membiayai iklan dan elektronik, membiayai aksi sosial dan yang terakhir menyewa helikopter untuk

mendatangi para konstituen di pelosok-pelosok pedalaman, dengan medan yang luas dan berat maka dede sitorus salah satu caleg yang dapat menjangkau semua itu, kesemua itu penting agar bagaimana calon legislatif dikenal.

Strategi Dedi Sitorus memanfaatkan Modal yang di milikinya

Strategi yang di lakukan terkait langsung dengan praktik seorang aktor dalam ruang sosial dan arena tertentu, berdasarkan modal-modal yang di miliki oleh aktor, Bourdeu (2006) merinci varian strategi tersebut menjadi strategi rekonversi modal mengacu pada mobilitas agen dalam ruang sosial berdasarkan pertukaran dan pembentukan modal-modal yang dimilikinya ke dalam modal-modal spesifik yang berlaku dalam arena tersebut, sedangkan strategi reproduksi mengacu pada cara-cara agen mengolah, memperluas, mempertahankan dan mengakumulasi modal-modal yang dimilikinya.

Modal sosial yang di miliki oleh dede sitorus adanya interaksi dengan masyarakat melalui kegiatan sosialnya, adanya jaringan relasi yang luas dan memiliki kepercayaan dari masyarakat maka dede sitorus berusaha mempertahankan modal sosialnya. Dalam sistem pemilu yang berbasis figuritas kepemilikan modal sosial sangat diperlukan dalam kerangka mendapatkan suara pemilik. Adanya kepercayaan yang tinggi yang di dapat oleh lembaga adat, masyarakat adat dan juga jemaat-jemaat kristen khatolik maka dede sitorus dapat memanfaatkan untuk menggerakkan massanya dalam memperoleh simpati sehingga menghasilkan suara dari komunitas-komunitas tersebut.

Modal politik berarti adanya dukungan politik baik dari rakyat maupun kekuatan-kekuatan yang dipandang dari representasi dari rakyat, dengan adanya kendaraan politik sehingga dapat mengikuti kontestasi sebagai calon anggota DPR RI pemilihan legislatif tahun 2019 maka dede sitorus memanfaatkan seluruh dukungan politik untuk mendapatkan suara mulai dari dukungan partai PDIP Kab. Nunukan, PAC-PAC di setiap kecamatan juga membentuk tim kampanye dari internal partai dan eksternal partai. Selain dari itu dede sitorus juga memiliki kecerdasan melihat momen sehingga

dukungan dari partai penguasa daerah didapatkan dan juga tokoh politik mendukung dede sitorus sehingga seluruh dukungan yang di dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap para konstituennya masing-masing.

Dengan adanya pekerjaan terdahulu membuat dede sitorus memiliki modal ekonomi yang besar sehingga sang aktor dapat menjalankan proses pemilihan legislatif tahun 2019 tanpa bergantung pada donatur, dengan dana kampanye paling tinggi diantara caleg yang lain yang di usung oleh partai politik maka dede sitorus dapat mengkonversi ke modal-modal yang lain. Dan juga dengan memiliki cost politik yang besar maka dede dapat membiayai operasional relawan, memberikan bantuan kepada masyarakat, membantu gereja-gereja, serta melakukan kampanye dengan mengunjungi wilayah-wilayah yang ada di pedalaman.

SIMPULAN

Dalam suatu kontestasi politik modal sosial sangat dibutuhkan dikarenakan harus memiliki jaringan sosial dengan masyarakat, dengan adanya interaksi yang di lakukan maka menumbuhkan rasa percaya terhadap seorang caleg. Modal politik merupakan kendaraan untuk ikut dalam sebuah pencalonan dengan adanya dukungan partai dan dari berbagai pihak membuat kerja politik semakin tampil kelihatan dan kekuatan semakin besar. Memiliki modal ekonomi (*Cost politic*) yang dominan maka pengadaan alat peraga kampanye dan juga kampanye secara *offline* serta *online* dapat dengan mudah dilakukan, modal ekonomi juga dapat dikonversi ke modal sosial sehingga dapat menambah relasi sosial yang dapat membantu dalam kemenangan. Dengan memiliki akumulasi modal lebih dari satu maka dede sitorus mendapatkan suara yang lebih besar dibanding dengan daerah lain di dapil kaltara, serta akumulasi semua modal ini dapat dimanfaatkan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Benuanta.co.id. (2019). Dedy Sitorus Siap Berjuang Melayani Masyarakat Kaltara. Retrieved February 12, 2020, from www.benuanta.co.id website:
<https://benuanta.co.id/2019/04/12/deddy-sitorus-siap-berjuang-melayani-masyarakat-kaltara/?page=28332434234=501>

- Dewi, K. H. (2018). *Modal, Strategi dan Jaringan.pdf* (pertama; K. H. Dewi, Ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fashri, F. (2014). *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Kreasi Wacana Offset.
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal (Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi)*. Malang: Intrans Publishing.
- Infopemilu.kpu.go.id. (2019). Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Retrieved from www.infopemilu.kpu.go.id/ website: <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>
- Kartika, I. et al. (2018). *Political capital of tjhai chui mie in 2017 singkawang mayoral election*. 3(2), 139-149.
- KPU Kaltara. (2019). *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI dari Setiap Kabupaten/Kota*. www.kpu.go.id.
- Malasari, F., & Putra, E. V. (2020). Modalitas Kemenangan Alkisman Pada Pemilu Legislatif DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif*.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.254>
- Marijan, K. (2006). *Demokrasi di Daerah* (Edisi Pert). Surabaya: Pustaka Eureka.
- Marijan, K. (2007). *Resiko Politik Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.
- Medistiara, Y. (2019). PDIP Laporkan Dana Kampanye Rp 345,02 Miliar. Retrieved from www.detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4531962/pdip-laporkan-dana-kampanye-rp-34502-miliar>
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1-11.
- Ramadhani, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 10, N. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Ria, I., Plaituka, R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2014). *Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014*. 1-11.
- Sahbani, A. (2014). MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019. Retrieved November 8, 2020, from www.hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca>

- /lt52e131d88b072/mk-putusan-pemilu-serentak-tahun-2019/
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Solihah, R. (2020). *Relasi Antara Modal Politik, Modal Ekonomi dan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. *Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara*. , Pub. L. No. 20 Tahun 2012, 30 (2012).
- Wance, M., & Djae, R. M. (2019). Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018. *Sosiohumaniora*, 21(3), 256–268. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21547>
- Wibowo, P. A. (2013). *Mahalnya Demokrasi memudarnya Ideologi Potret Komunikasi politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.